ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PERBANKAN SYARIAH ERA DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEKERJAAN YANG LAYAK (SDGs . 8) (STUDI KASUS: BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HAJI MISKIN PANDAI SIKEK)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Yuni Aqilah

NIM. 3322008

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Aqilah

Nim : 3322008

Tempat/Tanggal Lahir: Medan/07 Juni 2004

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

Judul Skripsi :"Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs 8) (Studi Kasus : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)"

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian ssurat ini pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2026

Yang menyatakan

Yuni Aqilah
NIM. 3322008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Yuni Aqilah Nim 3322008,** dengan judul **"Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs 8) (Studi Kasus : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)", menyatakan bahwa** memang skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2026
Pembimbing,

Dr. Sandra Dewi, SE., MM
NIP. 197307172014112002

ABSTRAK

Skripsi ini **berjudul "Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs 8) (Studi Kasus : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)"** yang ditulis oleh **Yuni Aqilah, Nim 3322008,** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

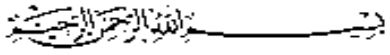
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan literasi digital, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan tenaga kerja di sektor teknologi informasi. Kedua era digital memberikan peluang bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat pembiayaan UMKM. Terakhir adanya peran BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam mendukung pencapaian SDGs 8, khususnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, belum diketahui secara optimal.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam tantangan yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam era digital yang berdampak pada kemampuan lembaga dalam mendukung pencapaian target SDG 8 terkait pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang-peluang digital yang dapat dioptimalkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan lapangan kerja yang layak sesuai dengan kerangka SDGs 8.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data penelitian ini terdapat dua informan, yaitu informan utama dan informan pendukung. Teknik Pengumpulan data disini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan & Verifikasi. Teknik keabsahan data disini adalah triangulasi Sumber dan triangulasi Metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada era digital meliputi belum tersedianya layanan digital seperti *mobile banking* dan *internet banking*, keterbatasan infrastruktur teknologi, perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, persaingan dengan fintech dan bank digital, serta pentingnya menjaga keamanan sistem informasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara itu, peluang yang dimiliki BPRS meliputi pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi, pengembangan layanan berbasis teknologi, perluasan akses pembiayaan kepada UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Berbagai peluang tersebut mampu memperkuat kontribusi BPRS dalam meningkatkan produktivitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8 tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Era Digital, BPRS, SDGs 8, Pertumbuhan Ekonomi

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dan melaksanakan penelitian di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan menghasilkan Skripsi yang diselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat besertakan salam selalu tercurahkan bagi baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman yang telah mengajarkan beribu kepada seluruh umat manusia.

Penyusunan Skripsi ini adalah salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana. Skripsi ini juga sebagai bukti penulis telah menyelesaikan penelitian di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Skripsi ini disusun dengan menggunakan tekad yang kuat dan melalui bimbingan orang-orang hebat. Sehingga dari Mei 2026 hingga Juni 2026 bertempatkan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penelitian telah terlaksana dengan baik oleh mahasiswa Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dapat terbuat dan terlaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak pimpinan dan pegawai BPRS, nasabah, dan pelaku UMKM yang menjadi penerima pembiayaan syariah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Selama melaksanakan kegiatan penelitian, penulis selalu mendapat dukungan dan juga dorongan dari sekitar dengan penuh perhatian penulis ingin mengucapkan segenap kata terimakasih kepada mereka yang selalu mendoakan serta membimbing setiap langkah dan juga perjuangan penulis. Untuk itu dengan berbesar hati penulis ingin memberikan apresiasi kepada :

1. Ibu **Prof.Dr.Silfia Hanani, S.Ag.,M.Si** selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M. Ag,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan dalam pembuatan skripsi

3. Ibu **Septria Susanti, S.Pd, ME** selaku **ketua program Studi Perbankan Syariah** Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi.
4. Ibu **Dr. Sandra Dewi, SE., MM** selaku dosen **Pembimbing Akademik** yang senantiasa membimbing dari awal proses perkuliahan sampai akhir semester.
5. Ibu **Dr. Sandra Dewi, SE., MM** selaku **Dosen Pembimbing** dari Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Yang telah memberikan evaluasi dalam melaksanakan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak **Hendri Kamal, SE** selaku **Pimpinan** BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
7. Teristimewa kepada ayahanda **Sugiarto** dan ibunda **Leli Ismei Rahayu** tercinta yang telah memberikan dukungan baik itu dukungan moral maupun dukungan materi. Selalu mendidik, membesarkan, memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Kepada abang kandung tercinta, **Ahmad Hamzah, S.Kom** yang turut mendukung untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana, dan telah banyak membantu penulis semasa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Juli 2026

Yuni Agilah
NIM. 3322008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Judul 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Teori Intermediasi Keuangan 16
B. Perbankan Syariah 18
C. Transformasi Digital dan Keuangan Digital 23
D. Pertumbuhan Ekonomi 27
E. Sustainable Development Goals (SDGs) 32
F. SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 39
G. Kajian Terdahulu 43
BAB III METODE PENELITIAN **50**
A. Jenis Penelitian 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 50
C. Jenis dan Sumber Data 51
D. Informan Penelitian 52
E. Teknik Pengumpulan Data 52

F. Metode Analisis Data 53
G. Teknik Keabsahan Data 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 55
B. Hasil Penelitian 62
C. Pembahasan 73
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Haji Miskin.....60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global saat ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Agenda 2030 melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada September 2015 dengan partisipasi 193 negara termasuk Indonesia—orientasi pembangunan internasional bergeser dari fokus semata pada pertumbuhan ekonomi menuju model yang lebih inklusif, merata, dan ramah lingkungan. SDGs hadir sebagai penyempurnaan atas *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015, dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas dan terintegrasi, yakni 17 tujuan dan 169 target yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia.[1]

Pada hakikatnya, MDGs dan SDGs memiliki tujuan yang sejalan. SDGs diluncurkan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari upaya MDGs dalam mengurangi kelaparan dan kemiskinan di tingkat global. Dengan demikian, SDGs tidak berdiri terpisah dari MDGs, melainkan meneruskan dan memperluas agenda yang telah dibangun sebelumnya. Kerangka SDGs berlandaskan lima pilar manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang diarahkan untuk mencapai tiga sasaran utama pada 2030, yakni

[1] UN DESA, 'The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023 New York, USA: UN DESA. © UN DESA', *Un*, 2023 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>.

mengakhiri kemiskinan, mewujudkan kesetaraan, dan menanggulangi perubahan iklim.[2]

Di antara 17 tujuan tersebut, SDGs 8 tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*) menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan suatu bangsa untuk mengangkat taraf hidup warganya. SDGs 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta perluasan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, laporan *The Sustainable Development Goals Report* 2023 yang diterbitkan PBB menyebutkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di negara-negara berkembang mengalami perlambatan signifikan pascapandemi COVID-19, sementara angka pengangguran kaum muda secara global masih mencapai 15,6 persen, tiga kali lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran dewasa.[3]

Sektor keuangan memegang peranan sentral dalam mendukung pencapaian SDGs 8, karena akses terhadap pembiayaan produktif merupakan prasyarat bagi pertumbuhan usaha, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perbankan syariah tampil sebagai alternatif keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung

[2] Sandra Dewi and others, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia', *Tax and Business Journal,* 4.2 (2023), 229–41.

[3] UN DESA.

perekonomian nasional, yang menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menyumbang 61,07 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia, memerlukan dukungan nyata dari lembaga keuangan yang inklusif dan responsif.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan perbankan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan perbankan syariah semakin diperkuat oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mendorong pertumbuhan signifikan sektor ini. Era Revolusi Industri 4.0 dan digitalisasi yang masif telah membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan struktural bagi industri perbankan syariah[4], khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di level komunitas dan berhubungan langsung dengan masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku UMKM di daerah.

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, merupakan salah satu representasi nyata dari lembaga keuangan mikro syariah yang berhadapan langsung dengan dinamika digitalisasi di level komunitas. Sebagai BPRS yang wajib melayani segmen masyarakat serta usaha yang belum terjangkau oleh bank umum konvensional, lembaga ini menghadapi serangkaian tantangan struktural yang kompleks dan saling berkaitan.

[4] Ihdina Isra Azana, 'Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Era Digital', 2025, 1–30.

Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah dan literasi digital di kalangan masyarakat sasaran[5]. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya berada pada angka 9,14 persen, jauh di bawah rata-rata literasi keuangan konvensional sebesar 49,68 persen[6]. Kondisi ini secara langsung menghambat adopsi layanan perbankan syariah berbasis digital oleh masyarakat di wilayah Pandai Sikek dan sekitarnya yang sebagian besar merupakan komunitas pedesaan dengan akses terbatas terhadap infrastruktur digital.

Kedua, keterbatasan kapasitas digitalisasi internal BPRS. Operasional yang masih bergantung pada sistem manual, minimnya tenaga ahli teknologi informasi (TI), serta infrastruktur digital yang belum memadai menjadi hambatan nyata dalam meningkatkan efisiensi penyaluran pembiayaan produktif. Ketiga, tekanan persaingan yang semakin intensif dari lembaga keuangan digital seperti *fintech* syariah dan bank digital yang memiliki kapasitas teknologi jauh lebih besar, sehingga berpotensi menggerus pangsa pasar BPRS di segmen UMKM yang selama ini menjadi mitra utama pertumbuhan ekonomi lokal. Keempat, keterbatasan modal dan skala operasional BPRS yang lebih kecil dibandingkan bank umum syariah menyebabkan keterbatasan dalam melakukan investasi teknologi secara signifikan.

---

[5] Muhammad Ash Shiddiqy, 'Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital', *Jasie*, 2.1 (2023), 677–83 <https://doi.org/10.31942/jse.v2i1.8410>.

[6] OJK, 'Booklet Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan', *Survey Report*, 2022, pp. 1–26 <www.ojk.go.id>.

Di balik tantangan tersebut, era digital juga membuka peluang strategis yang tidak kecil bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Pertama, digitalisasi layanan keuangan membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat di wilayah terpencil melalui *mobile banking* syariah dan *platform* pembiayaan digital, sehingga hambatan geografis yang selama ini menjadi penghalang dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan Hera Susanti (2024) bahwa transformasi digital pada perbankan syariah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi komunitas Muslim dengan mengeliminasi hambatan geografis dan infrastruktur.[7]

Kedua, potensi kolaborasi dengan *fintech* syariah menawarkan jalan keluar atas keterbatasan kapasitas internal BPRS. Melalui kemitraan strategis, BPRS dapat mengakses teknologi canggih tanpa harus menanggung seluruh biaya pengembangan infrastruktur digital secara mandiri. Ketiga, peningkatan inklusi keuangan digital membuka peluang bagi BPRS untuk menjangkau segmen nasabah baru, khususnya generasi muda yang familiar dengan teknologi namun membutuhkan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Keempat, inovasi produk pembiayaan berbasis teknologi seperti pembiayaan murabahah digital, pengelolaan zakat dan wakaf secara digital, serta layanan tabungan berbasis aplikasi dapat memperkuat posisi kompetitif BPRS sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

[7] Keuis Hera Susanti, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan', *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2024), 13–19 <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.

Tantangan dan peluang yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memiliki keterkaitan langsung dengan dua target utama SDGs 8. Pertama, target 8.1 dan 8.2 yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif: kemampuan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM secara langsung mendorong aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, target 8.3 dan 8.5 yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja layak: pembiayaan usaha yang disalurkan BPRS kepada pelaku UMKM menjadi penggerak terciptanya lapangan pekerjaan baru yang memberikan penghasilan adil dan keamanan kerja bagi masyarakat.

SDGs 8 mendefinisikan pekerjaan yang layak (*decent work*) sebagai pekerjaan yang produktif, memberikan penghasilan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja, serta menjamin perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya[8]. Dalam konteks BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, implementasi SDGs 8 tercermin melalui beberapa dimensi operasional lembaga ini.

Dimensi pertama adalah perluasan akses pembiayaan produktif: dengan menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah yang adil kepada pelaku UMKM, BPRS mendukung pengembangan usaha yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal. Dimensi kedua adalah penguatan inklusi keuangan: target 8.10 SDGs secara spesifik menekankan perluasan akses layanan keuangan, termasuk perbankan dan asuransi, bagi seluruh lapisan masyarakat. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dengan fokusnya pada masyarakat berpenghasilan rendah dan

[8] UN DESA.

pelaku usaha kecil, berperan sebagai pintu masuk inklusi keuangan di tingkat komunitas.

Dimensi ketiga adalah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan: melalui pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan keadilan, BPRS mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan bersama. Dimensi keempat adalah pemberdayaan wirausaha lokal[9]: dengan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil di wilayah Tanah Datar, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek berkontribusi pada target 8.3 SDGs yang mendorong kebijakan berbasis pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi.

Namun demikian, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 masih berada di angka 4,82 persen, dengan proporsi pekerja rentan (*vulnerable employment*) mencapai 56,7 persen dari total angkatan kerja, serta hanya 38,9 persen[10] UMKM yang memiliki akses terhadap pembiayaan formal menurut survei OJK (2023). Data-data ini mengonfirmasi bahwa kesenjangan inklusi keuangan (*financial inclusion gap*) merupakan salah satu hambatan terbesar bagi realisasi SDGs 8, dan di sinilah relevansi dan urgensi optimalisasi peran BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjadi sangat krusial.

[9] Nomico Journal, 'Sustainable Finance As A Moral Objective: An Islamic Economic Philosophy Perspective On The Optimization Of Sharia Fintechsuhardi Arif Rahman Hakim 1 , Wahyu Amru Rofiqhoh 2 , Nur Siamah 3', 2.12 (2026), 1–10.

[10] Badan Pusat Statistik, 'KEADAAN', 2024.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menghadapi tantangan dan peluang yang tersedia dalam menggunakan teknologi digital yang sudah berkembang sangat pesat pada saat ini untuk meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat luas dan mengembangkan inovasi produk. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana tantangan dan peluang digitalisasi pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek berdampak terhadap pencapaian SDGs 8 di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus masukan praktis bagi pengembangan strategi perbankan syariah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Era Digital Dalam Meningatkan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs. 8) (Studi Kasus: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan literasi digital, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan tenaga kerja di sektor teknologi informasi.

2. Era digital memberikan peluang bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat pembiayaan UMKM.
3. Peran BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam mendukung pencapaian SDGs 8, khususnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, belum diketahui secara optimal.
4. Kontribusi pembiayaan dan layanan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat perlu dikaji lebih mendalam.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang dapat dikaji, penelitian ini dibatasi pada analisis tantangan dan peluang yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam era digital, serta implikasinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 8 (SDGs 8) tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penyediaan pekerjaan yang layak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Apa saja tantangan yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam era digital yang menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak SDGs. 8?

b. Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam era digital untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak sesuai dengan target SDGs. 8?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam tantangan yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam era digital yang berdampak pada kemampuan lembaga dalam mendukung pencapaian target SDG 8 terkait pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak.

b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang-peluang digital yang dapat dioptimalkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan lapangan kerja yang layak sesuai dengan kerangka SDG 8.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Strata 1 (S1) gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur tentang perbankan syariah, transformasi digital, dan pencapaian SDGs khususnya SDGs 8 di Indonesia.

c. Sebagai masukan bagi manajemen BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan pemangku kebijakan (OJK, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah) dalam menyusun strategi penguatan digitalisasi perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

d. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu serupa pada lembaga keuangan mikro syariah di konteks daerah lainnya.

F. Penjelasan Judul

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis akan mendefinisikan frasa-frasa yang digunakan dalam judul penelitian ini, terutama tentang "Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Era Digital Terhadap Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs . 8) (Studi Kasus: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek).

Analisis	: Suatu proses investigasi sistematis yang bertujuan mengidentifikasi, mengurai, dan menafsirkan faktor-faktor yang memengaruhi suatu fenomena. Dalam konteks

	penelitian ini, analisis digunakan untuk mengkaji secara kritis tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah di era digital dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap SDG 8.
Tantangan	: Hambatan dan kendala struktural, institusional, maupun operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah khususnya BPRS dalam proses adaptasi terhadap ekosistem keuangan digital, yang berdampak pada kapasitas lembaga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja layak.
Peluang	: Potensi dan ruang strategis yang dibuka oleh

	perkembangan teknologi digital bagi perbankan syariah untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan, memperluas jangkauan pembiayaan UMKM, serta meningkatkan kontribusinya terhadap pencapaian SDG 8.
Era Digital	: Periode perkembangan peradaban yang ditandai oleh penggunaan massif teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet, perangkat *mobile*, kecerdasan buatan, dan *big* data sebagai infrastruktur utama berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.[11]
Perbankan Syariah	: Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam

[11] Nisa Khairunnisa and others, 'Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital', *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.2 (2024), 113–22 <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.553>.

(syariah), yang secara tegas melarang praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan mekanisme bagi hasil dan akad yang adil dalam setiap transaksi keuangan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs.8)

: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedelapan yang menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata; menciptakan lapangan kerja yang produktif, aman, dan berkeadilan; serta memperkuat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan target pencapaian pada tahun 2030.

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasi

berdasarkan prinsip syariah dan berfokus pada pelayanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Lembaga ini dipilih sebagai objek studi kasus karena relevansinya sebagai representasi BPRS yang berhadapan langsung dengan dinamika digitalisasi keuangan di level komunitas.

Berdasarkan penjelasan makna dari frasa-frasa judul diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi serta peluang yang tersedia untuk perbankan syariah era digital dengan memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak yang sesuai dengan tujuan SDGs. 8 di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang ada bagi perbankan syariah dalam era digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan pekerjaan yang layak di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sesuai dengan tujuan SDGs. 8.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Intermediasi Keuangan

Jhon Gurley (1996), yang menyatakan bahwa teori Intermediais membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar sebgai penyekong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan kepada pihak kekurangan dana. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu untuk memperlancar pembiyaan, pencapaian stabilitas keuangan dan sebagai pelaksanaan kebjakan moneter, maka kondisi perbankan harus tetap stabil.[12]

Pentingnya fungsi intermediasi ini agar roda perekonomian dapat terus berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi. Hal ini karena pihak bank akan mengalokasikan dana nasabah kepada yang membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman kredit. Pemberian kredit merupakan bisnis perbankan untuk memperoleh laba dari selisih antara bunga dengan dana yang dikembalikan oleh peminjam. Semakin tinggi nilai intermediasi perbankan maka semakin baik kondisi perbankan.[13]

Selain itu Intermediasi kuangan adalah proses pembelian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit rumah tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan

[12] Mandala, Manurung., Rahartja Prathama. (2014), Uang, Perbankan, dan ekonomi Moneter. Penerbit Fakultas Ekononomi Universitas Indonesia.

[13] Inderst, Roman, Mueller, Holger., "Bank Capital strukture and Credit Desisions", journal Of Financial Intermediation, 2008, No 17 pp. 295-314

pengalihan dana dari penabung (lenders) kepada peminjam (borrowers). Pengalihan ini dilakukan oleh lembaga sebagai lembaga intermediasi. Lembaga keuangan memiliki peran dalam proses pengalihan dana dalam perekonomian. Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain berupa saham, obigasi, commercial paper, dan perjanjian kredit. Sementara sekuritas sekunder dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, dan raksa dana. Bagi penabung, simpanan tersebut merupakan aset finansial (financial asset), sedangkan bagi bank merupakan utang (financial liability). Selanjutnya, sekuritas sekunder tersebut dapat dialihkan menjadi aset finansial, misalnya dengan cara memberi pinjaman kepada unit defisit atau dengan membeli surat-surat berharga dipasar uang dan pasar modal.[14]

Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori intermediasi keuangan karena ingin menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai tantangan serta peluang dalam digitalisasi perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat meneliti pengalaman para pimpinan BPRS, pegawai, nasabah, dan pelaku UMKM terkait pelaksanaan layanan

[14] Jonni M., Adler Haymans M. 2019. Ekonomi keuangan dan kebijakan moneter, Penerbit Salemba empat, Jakarta

digital dalam perbankan syariah serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 8.

B. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (*interest*), perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan akad-akad syariah lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kehadiran perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, serta terhindar dari praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).[15]

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah yang dimaksud merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan

[15] Lukman Hakim, *Manajeme Perbankan Syariah*, 2016 <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>.

usaha, maupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dengan demikian, seluruh aktivitas operasional bank syariah harus mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.[16]

Dalam konteks penelitian ini, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Peran tersebut menjadi semakin penting di era digital karena perkembangan teknologi memberikan peluang bagi BPRS untuk memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang sejalan dengan tujuan SDGs 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat baik dari perspektif syariah maupun regulasi nasional. Dari perspektif Islam, praktik perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yang mengatur hubungan ekonomi antarmanusia dengan menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba. Salah satu dasar hukum utama terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli

[16] Shiddiqy.

dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar filosofis bagi pengembangan sistem perbankan syariah modern.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, operasional perbankan syariah juga mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai produk dan akad perbankan syariah[17]. Fatwa tersebut memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir.

Di Indonesia, landasan yuridis perbankan syariah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan kepastian hukum bagi perkembangan industri perbankan syariah[18]. Regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah, termasuk BPRS, agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, yaitu tambahan yang ditetapkan secara sepihak dalam transaksi pinjam

[17] Adelia Sari, Izza Aulianisa, and Ilham Ilham, 'Dasar Hukum Dan Prinsip Perbankan Syariah Di Indonesia', *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07.01 (2025), 77–87.

[18] Perbankan Syariah and others, 'Prinsip - Prinsip Hukum Perbankan Syariah', 2025.

meminjam[19]. Larangan tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil karena keuntungan diperoleh melalui aktivitas usaha yang produktif dan bukan dari eksploitasi terhadap pihak lain. Oleh sebab itu, perbankan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil yang memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara bank dan nasabah.

Selain larangan riba, perbankan syariah juga menghindari unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Setiap akad yang dilakukan harus memiliki kejelasan mengenai objek transaksi, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Prinsip lainnya adalah larangan maysir atau spekulasi yang berlebihan[20]. Dalam sistem perbankan syariah, setiap aktivitas ekonomi harus memiliki dasar transaksi yang nyata dan produktif sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini menjadikan perbankan syariah lebih dekat dengan sektor riil dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

d. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan

[19] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2014.
[20] Hasan.

menyalurkannya kembali kepada sektor-sektor produktif melalui berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah[21]. Fungsi ini memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya keuangan secara lebih efektif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain fungsi intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial yang tercermin melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf[22]. Fungsi sosial tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Tujuan utama perbankan syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut sejalan dengan konsep maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Dalam penelitian ini, tujuan perbankan syariah relevan dengan peran BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat dan menciptakan peluang kerja melalui pembiayaan produktif yang berkelanjutan.

e. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah meliputi tabungan, giro, dan deposito syariah yang menggunakan akad *wadiah*

[21] Lex Privatum, 'Lex Privatum , Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014', 2014.

[22] Fitriani Hasibuan and others, 'Analisis Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5.1 (2024), 54–67 <https://doi.org/10.24952/jisfim.v5i1.12287>.

maupun *mudharabah*. Melalui produk tersebut, masyarakat dapat menyimpan dana dengan tetap memperoleh manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[23]

Sementara itu, produk pembiayaan terdiri atas berbagai akad seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam,* dan *istishna*'. Berbagai akad tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.[24]

Perkembangan teknologi digital juga mendorong lahirnya berbagai layanan digital *banking* seperti *mobile banking*, internet *banking*, QRIS, dan layanan pembayaran elektronik berbasis syariah. Inovasi tersebut memberikan peluang bagi BPRS untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan nasabah, khususnya di daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

C. Transformasi Digital dan Keuangan Digital

a. Pengertian Era Digital

Era digital merupakan suatu periode perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, perangkat digital, serta sistem berbasis teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi

23 Nofinawati Nofinawati, 'Akad Dan Produk Perbankan Syariah', *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8.2 (2014), 219 <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>.

24 Nofinawati.

digital telah mengubah pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, sistem pendidikan, hingga layanan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis digital. Transformasi tersebut menciptakan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses terhadap berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.[25]

Perkembangan era digital juga mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Masyarakat saat ini cenderung menginginkan layanan yang cepat, mudah, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu[26]. Kondisi ini menyebabkan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, dituntut untuk melakukan inovasi dan adaptasi teknologi agar mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis.

Dalam konteks penelitian ini, era digital menjadi faktor eksternal yang memengaruhi operasional BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi menuntut BPRS untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital guna mempertahankan daya saing sekaligus mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

---

[25] Norman Gisatriadi, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital', *Jurnal Media Ilmu*, 3.2 (2024), 216–31 <https://doi.org/10.31869/jmi.v3i2.6092>.

[26] Ariby Wulan, Deswita Naila, and Hasibuan Reni Ria Armayani, 'Economic Insight: Journal of Economic and Management', *Economic Insight: Journal of Economic and Management*, 1.2 (2025), 54–61 <https://journal.aspublisher.co.id/index.>.

b. Pengertian Digitalisasi Perbankan

Digital banking merupakan salah satu bentuk transformasi layanan perbankan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan berbagai layanan keuangan secara elektronik. Melalui sistem ini, nasabah dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa terikat oleh batasan lokasi maupun waktu[27]. Digitalisasi tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi perbankan elektronik, tetapi juga mencakup transformasi proses bisnis, sistem informasi, pengelolaan data, hingga pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi digital.

Transformasi digital dalam industri perbankan berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat *mobile* oleh masyarakat. Berbagai layanan seperti internet *banking, mobile banking, digital payment,* QRIS, hingga pembukaan rekening secara daring menjadi bentuk nyata implementasi digitalisasi dalam sektor perbankan[28]. Kehadiran layanan tersebut memungkinkan nasabah

[27] Kebijakan D A N Implementasi, 'INDONESIA DALAM SISTEM INFORMASI', 11.204 (2026), 543–59.

[28] Muhammad Agung Nugraha Nugraha, Norvadewi Norvadewi, and Yovanda Noni, 'Analisis Implementasi Digital Banking Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Samarinda', *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 1.3 (2024), 314–21 <https://doi.org/10.59407/jismdb.v1i3.628>.

memperoleh akses layanan keuangan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Bagi perbankan syariah, digitalisasi menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif. Digitalisasi memungkinkan bank syariah meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang berada di daerah terpencil dan belum terjangkau layanan keuangan formal. Dalam penelitian ini, digitalisasi menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

c. Konsep Keuangan Digital (*Digital Finance*)

Keuangan digital (*digital finance*) merupakan sistem penyediaan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam proses transaksi, penyimpanan data, serta penyampaian layanan kepada pengguna[29]. Konsep keuangan digital berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.

Keuangan digital mencakup berbagai layanan seperti pembayaran elektronik, dompet digital (*e-wallet*), transfer dana daring, pembiayaan digital, investasi digital, hingga layanan perbankan

[29] Keuangan Dan, Ekonomi Hijau, and Arsyaf Tampubolon, *Ekonomi Digital Menuju Inklusi Ekonomi Digital Menuju Inklusi*, 2019.

berbasis aplikasi[30]. Kehadiran layanan tersebut mampu meningkatkan inklusi keuangan karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan tanpa harus mengunjungi kantor lembaga keuangan secara langsung.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keuangan digital berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal, mempercepat transaksi bisnis, serta memperluas akses pasar[31]. Oleh karena itu, pengembangan keuangan digital menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, konsep keuangan digital relevan karena BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menghadapi tuntutan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanan keuangannya. Keberhasilan implementasi keuangan digital berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan produktif yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan pekerjaan yang layak.

D. Pertumbuhan Ekonomi

[30] Fadhilah., 'Digitalisasi Sistem Pembayaran Dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2.2 (2025), 13–18.

[31] D, S Purba and others, 'Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* , 10.1 (2021), 126–39.

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditunjukkan oleh meningkatnya output barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan karena mencerminkan kemampuan suatu negara atau daerah dalam menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah.[32]

Menurut teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan angka statistik semata, tetapi juga sebagai proses yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama pembangunan yang berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.[33]

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menyediakan

[32] Tannia Regina, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempenggaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11.1 (2022), 36–45 <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.201>.

[33] David E. O'Connor, *Sustainable Economic Development*, *Economics: The Definitive Encyclopedia from Theory to Practice*, 2017, IV–IV <https://doi.org/10.5040/9798400638503.ch-013>.

berbagai kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kemajuan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan akumulasi modal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh perkembangan sosial, teknologi, dan kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.[34]

Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel penting yang berkaitan dengan peran BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Melalui pembiayaan produktif yang didukung oleh transformasi digital, BPRS diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

b. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Indikator yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai PDB atau PDRB menunjukkan adanya peningkatan

[34] Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development (13th Ed.)*, *Pearson*, 2020 <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>.

produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu.[35]

Selain PDB dan PDRB, indikator lain yang sering digunakan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya.[36]

Indikator berikutnya adalah tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran[37]. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas umumnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya pada SDGs 8.

Dalam penelitian ini, indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan aktivitas usaha masyarakat, tetapi juga dari kemampuan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam memperluas

---

[35] Analisis Konsep and Pendekatan Pengukuran, 'Interdisciplinary Explorations in Research FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN', 2 (2024), 1375–84.

[36] Rizki Aisyah and Nessa Nurtohmah, 'Analisis Perubahan Pendapatan Per Kapita Di Indonesia: Tren Dan Faktor-Faktor Penyebab', *Journal of Cyber and Community Service*, 1.1 (2025), 15–20 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

[37] M Wardiansyah, Yulmardi Yulmardi, and Zainul Bahri, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera)', *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 5.1 (2017), 13–18 <https://doi.org/10.22437/jels.v5i1.3924>.

akses pembiayaan kepada UMKM sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah akumulasi modal yang mencakup investasi dalam bentuk infrastruktur, teknologi, mesin, dan berbagai sarana produksi lainnya. Investasi yang memadai dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Faktor berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas yang tinggi akan mampu meningkatkan efisiensi produksi serta mempercepat proses pembangunan ekonomi[38]. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kemajuan teknologi juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi[39]. Inovasi teknologi mampu meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menciptakan berbagai peluang usaha baru. Dalam era digital

[38] Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin, 'Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2.3 (2024), 40–47 <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>.

[39] Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin.

saat ini, teknologi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi karena mampu mengubah pola bisnis dan memperluas akses pasar secara signifikan.

Selain itu, perkembangan sektor keuangan turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Perbankan syariah berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor produktif melalui pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha. Keberadaan pembiayaan syariah terbukti mampu meningkatkan produktivitas UMKM dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, transformasi digital yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat menjadi faktor yang memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi layanan, perluasan akses pembiayaan, dan peningkatan produktivitas usaha nasabah. Oleh karena itu, analisis mengenai tantangan dan peluang digitalisasi menjadi penting untuk memahami kontribusi BPRS terhadap pembangunan ekonomi daerah.

E. Sustainable Development Goals (SDGs)

a. Pengertian SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta berbagai permasalahan ekonomi dan sosial lainnya. Agenda ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.[40]

SDGs menjadi kerangka pembangunan yang bersifat universal karena berlaku bagi seluruh negara tanpa memandang tingkat pembangunan ekonomi masing-masing. Berbeda dengan agenda pembangunan sebelumnya, SDGs menempatkan prinsip *leave no one behind* sebagai landasan utama yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Prinsip tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kelompok rentan juga memperoleh akses terhadap berbagai peluang pembangunan.[41]

Dalam konteks pembangunan ekonomi, SDGs memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan kemiskinan,

[40] Virginie Guiraudon, 'European Court of Justice', *Immigration and Asylum [3 Volumes]: From 1900 to the Present [3 Volumes]*, 1.October (2005), 217–19 <https://doi.org/10.54648/ecta2007029>.

[41] Department of Economic and Social Affairs, 'The Sustainable Development Goals Report', *United Nations*, 2023, 26–27 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/#>.

peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sistem keuangan yang inklusif[42]. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan syariah, termasuk BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi SDGs melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagi penelitian ini, SDGs menjadi landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis bagaimana peluang dan tantangan digitalisasi perbankan syariah dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan kedelapan mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peran BPRS tidak hanya dilihat dari aspek bisnis semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Sejarah dan Perkembangan SDGs

Lahirnya SDGs tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan global sebelumnya yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). MDGs mulai diterapkan pada tahun 2000 dengan fokus utama pada pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Meskipun MDGs berhasil mencapai berbagai kemajuan, masih terdapat sejumlah tantangan

[42] Ebrahim Omar Basalma, 'The SDG-Islamic Banking Nexus: Insights from the OIC Top Economies', *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13.1 (2024), 347–68 <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.21917>.

pembangunan yang belum terselesaikan sehingga diperlukan agenda pembangunan yang lebih komprehensif dan inklusif.[43]

Sebagai tindak lanjut dari MDGs, negara-negara anggota PBB menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada bulan September 2015 di New York. SDGs secara resmi berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 dan menjadi agenda pembangunan global hingga tahun 2030. Agenda ini mencakup 17 tujuan dan 169 target yang saling terintegrasi untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dunia.[44]

Perkembangan SDGs menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dari yang sebelumnya berfokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. SDGs menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs melalui berbagai kebijakan nasional dan daerah. Implementasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Dalam konteks ini,

[43] United Nations, 'The Millennium Development Goals Report', *United Nations*, 2015, 72 <https://doi.org/978-92-1-101320-7>.

[44] Guiraudon.

perbankan syariah memiliki peluang untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui penyediaan pembiayaan produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.[45]

c. Pilar-Pilar SDGs

Pelaksanaan SDGs di Indonesia didasarkan pada empat pilar utama yang saling berkaitan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum serta tata kelola. Keempat pilar tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan.[46]

Pilar pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Pilar ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan sehingga setiap kebijakan yang dilakukan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[47]

Pilar pembangunan ekonomi berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan produktivitas,

---

[45] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Menuju 2030', *Kementerian PPN/Bappenas*, 2021, 35 <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf>.

[46] Kementerian PPN, 'Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)', *Kementerian PPN*, 2020.

[47] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

pengurangan kesenjangan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja yang layak[48]. Pilar ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penelitian mengenai peran BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan produktif dan transformasi digital layanan keuangan syariah.

Pilar pembangunan lingkungan bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan yang bertanggung jawab. Sementara itu, pilar hukum dan tata kelola menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat, transparan, akuntabel, serta mampu mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan secara efektif.

Keempat pilar tersebut saling mendukung dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pilar pembangunan ekonomi menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak melalui pemanfaatan teknologi digital.

d. Tujuan dan Target SDGs

SDGs terdiri atas 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan

[48] Department of Economic and Social Affairs.

gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, hingga kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Setiap tujuan memiliki target yang spesifik dan terukur sebagai indikator keberhasilan implementasinya.[49]

Tujuan kedelapan SDGs, yaitu *Decent Work and Economic Growth* atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Tujuan tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penguatan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat.[50]

Salah satu target SDGs 8 adalah memperkuat kapasitas lembaga keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Dalam konteks ini, digitalisasi perbankan syariah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi motor penggerak perekonomian daerah.[51]

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebagai lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target

---

[49] Prajal Pradhan and others, 'A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions', *Earth's Future*, 5.11 (2017), 1169–79 <https://doi.org/10.1002/2017EF000632>.

[50] ILO, *Decent Work and the Sustainable Development Goals : A Guidebook on SDG Labour Market Indicators*, *©International Labour Organization*, 2018 <https://www.ilo.org/media/414431/download>.

[51] Peterson K. Ozili, 'Financial Inclusion Research around the World: A Review', *Forum for Social Economics*, 50.4 (2021), 457–79 <https://doi.org/10.1080/07360932.2020.1715238>.

SDGs 8 melalui pembiayaan usaha produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BPRS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak di era digital.

F. SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian SDGs 8

Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-8 merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan manfaat yang merata, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan sosial maupun lingkungan.[52]

SDGs 8 lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan global seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, SDGs 8 menempatkan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak sebagai salah satu

[52] Basalma.

instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, SDGs 8 memiliki relevansi yang sangat tinggi karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan suatu negara dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan SDGs 8 sebagai landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak melalui transformasi digital layanan perbankan syariah. Analisis tersebut menjadi penting mengingat digitalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi daerah.

b. Target dan Indikator SDGs 8

SDGs 8 memiliki beberapa target yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Target tersebut mencakup peningkatan produktivitas ekonomi melalui

diversifikasi, inovasi, dan modernisasi teknologi; penciptaan lapangan kerja yang layak; peningkatan kewirausahaan; serta penguatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif.[53]

Salah satu target penting SDGs 8 adalah meningkatkan produktivitas ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi[54]. Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sektor perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target tersebut.

Selain itu, SDGs 8 juga menekankan pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Akses keuangan yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh modal usaha, melakukan investasi produktif, dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Dalam hal ini, perbankan syariah berperan sebagai lembaga yang dapat memperluas inklusi keuangan melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, target dan indikator SDGs 8 digunakan sebagai acuan untuk menilai kontribusi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan

[53] Basalma.
[54] Basalma.

produktif, digitalisasi layanan, dan dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

c. Pekerjaan Layak (*Decent Work*)

Konsep *decent work* atau pekerjaan yang layak pertama kali diperkenalkan secara formal oleh *International Labour Organization* (ILO) pada 1999 melalui laporan Direktur Jenderal ILO yang berjudul "*Decent Work*", sebagai respons terhadap kebutuhan untuk merumuskan standar pekerjaan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja secara kuantitatif, tetapi juga kualitas dan keadilan dari pekerjaan tersebut. ILO mendefinisikan *decent work* sebagai pekerjaan yang produktif dan menghasilkan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, memberikan prospek pengembangan diri yang lebih baik dan integrasi sosial, kebebasan bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi seluruh perempuan dan laki-laki.[55]

Pekerjaan layak tidak hanya berkaitan dengan tersedianya lapangan kerja, tetapi juga mencakup kualitas pekerjaan yang diberikan. Aspek-aspek seperti upah yang memadai, lingkungan kerja yang aman, perlindungan sosial, kesempatan pengembangan karier, dan kesetaraan

[55] Juan Somavía, 'Adress of Secretary-General of the International Labour Conference', *International Labour Conference*, 1999.

kesempatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.[56]

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, penciptaan pekerjaan yang layak memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan[57]. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas usaha yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

Bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, penciptaan pekerjaan yang layak dapat diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan produktif kepada pelaku UMKM. Pembiayaan tersebut memungkinkan pelaku usaha mengembangkan kapasitas bisnisnya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

G. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa hasil penelitian yang dikaji oleh peneliti sebelumnya yang judulnya mendekati pembahasan yang penulis angkat.

---

[56] Robert V. Horn, 'Statistical Indicators', *Statistical Indicators*, 142.2 (1993) <https://doi.org/10.1017/cbo9780511518164>.

[57] Philippe Egger, 'Towards a Policy Framework for Decent Work', *International Labour Review*, 141.1–2 (2002), 161–74 <https://doi.org/10.1111/j.1564-913x.2002.tb00234.x>.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil dan Pembahasan	Nama Jurnal
1.	Muhamad Subhan, dkk (2025)[58]	Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mendukung Agenda SDGs di Indonesia	Dalam penelitian ini diketahui bahwa Perbankan syariah di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 8 yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan pekerjaan layak. Data yang digunakan ialah teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan SDGs dan perbankan syariah Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan perkembangan dari perbankan syariah Indonesia serta menjelaskan konsep SDGs yang ssedang diupayakan pemerintah.	Margin: Journal Of Islamic Banking
2.	Keuis Hera Susanti (2024)[59]	Tantangan dan Peluang Perbankan	Dalam penelitian ini diketahui bahwa Transformasi digital	Persya:

[58] Muhamad Subhan and others, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mendukung SDGs Di Indonesia', *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5.1 (2025), 122–39.
[59] Hera Susanti.

		Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	telah membawa dampak positif signifikan pada perbankan syariah, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat Muslim dengan menghilangkan batasan geografis dan infrastruktur, serta mendorong efisiensi operasional melalui otomatisasi proses dan analisis data canggih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami secara komprehensif dampak transformasi digital pada perbankan syariah dan masyarakat Muslim. Pendekatan ini melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan utama, seperti manajer senior perbankan syariah, regulator keuangan, aktivis masyarakat Muslim, dan ahli teknologi informasi.	Jurnal Perbankan Syariah
3.	Calvin Alfiansyah dan Fauzatul Laily Nisa (2024)[60]	Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan	Dalam penelitian ini diketahui bahwa bahwa perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam	Jurnal Ekonomi Bisnis dan

[60] Calvin Alfiansyah and Fauzatul Laily Nisa, 'Analisis Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.3 (2024), 199–210 <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814>.

		Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dari tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini akan menggambarkan tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan berupa tulisan berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menemukan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan.	Manajemen (JISE)
4.	Rizki Kurniawan dan Muhammad Iqbal Fasa (2024)[61]	Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan	Dalam penelitian ini diketahui bahwa transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap perbankan syariah, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat Muslim. enelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami secara komprehensif dampak	Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik

[61] Pertumbuhan Berkelanjutan, Rizki Kurniawan, and Muhammad Iqbal Fasa, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam', *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik* , 2.3 (2024).

			transformasi digital pada perbankan syariah dan masyarakat Muslim. Pendekatan ini melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan utama, seperti manajer senior perbankan syariah, regulator keuangan, aktivis masyarakat Muslim, dan ahli teknologi informasi.	
5.	Zulhalmi Syahputra Nasution dan Irsad Lubis (2025)[62]	The Role of Islamic Financial Institutions in Encouraging Sustainable Economic Growth in Indonesia	Dalam penelitian ini diketahui bahwa peran lembaga keuangan syariah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah, lembaga keuangan Islam terbukti mampu mendukung sektor produktif, menurunkan angka pengangguran, dan mendorong investasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji peran lembaga keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Islamic International Conference on Education, Communication, and Economics

[62] Irsad Lubis Zulfahmi Syahputra Nasution, 'The Role of Islamic Financial Institutions in Encouraging Sustainable Economic Growth in Indonesia', *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1.2 (2025), 75–86 <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.249>.

			berkelanjutan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. yang diperoleh melalui laporan resmi dari OJK, BI, dan BPS. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengkaji hubungan antara variabel kinerja lembaga keuangan Islam dan indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.	
6.	Ebrahim Omar Basalma (2024)[63]	The SDG-Islamic Banking Nexus: Insight From The OIC Top Economies	Dalam penelitian ini diketahui bahwa korelasi antara indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan performa sektor perbankan syariah di lima negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) selama periode 2013-2022. Penelitian ini menegaskan peran penting keuangan syariah dalam mendukung pencapaian SDG, khususnya dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab dan menjaga stabilitas keuangan global. Desain	Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

[63] Basalma.

			penelitian ini mengacu pada pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemeriksaan empiris data ekonomi sebelumnya. Pendekatan analisis data panel diterapkan untuk menyelidiki hubungan antara indikator SDG terpilih dan kinerja IBF di lima negara OKI. Data panel terdiri dari data deret waktu tahunan yang dikumpulkan dari tahun 2013-2022.	

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam fenomena sosial ekonomi yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data dalam konteks alamiah (*natural setting*) di lingkungan responden. Pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi, yang dalam hal ini berkaitan dengan tantangan dan peluang digitalisasi perbankan syariah dalam konteks pencapaian SDG 8 di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yang berlokasi di Jalan Raya Bukittinggi–Padang Panjang Km. 10, Pandai Sikek, Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif (*purposive site selection*) karena BPRS ini memiliki peran strategis dalam pembiayaan UMKM dan pengembangan ekonomi masyarakat daerah, sekaligus representatif sebagai BPRS yang menghadapi tantangan digitalisasi di wilayah semi-perkotaan dan pedesaan. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari bulan

Mei 2026 hingga Juni 2026, mencakup tahapan observasi awal, pengumpulan data, wawancara mendalam, dan penyusunan laporan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa informasi, penjelasan, pendapat, dan keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan pimpinan, pegawai, nasabah, dan pelaku UMKM yang merupakan mitra pembiayaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Data primer digunakan untuk menggali informasi mengenai tantangan nyata yang dihadapi, peluang yang dipersepsikan, strategi digitalisasi yang telah atau sedang dijalankan, serta kontribusi aktual perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak di tingkat komunitas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen

resmi dan arsip BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, buku akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Informan utama adalah pimpinan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yang dipilih karena memiliki wewenang dan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan kelembagaan, strategi digital, dan tantangan operasional. Informan pendukung terdiri dari pimpinan dan pegawai BPRS, nasabah, dan pelaku UMKM yang menjadi penerima pembiayaan syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi digitalisasi layanan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif terbatas, di mana peneliti mengamati aktivitas layanan perbankan tanpa ikut serta secara aktif dalam operasional.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada seluruh informan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*), yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara sebagai acuan namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengelaborasi jawaban secara lebih luas sesuai pengalaman dan pengetahuannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: profil kelembagaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, laporan perkembangan pembiayaan, data jumlah nasabah dan volume transaksi, laporan layanan digital, serta dokumentasi foto kegiatan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Reduksi Data: Proses penyaringan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah dari berbagai sumber menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan kategori analitis yang telah

ditetapkan, yaitu: tantangan digitalisasi perbankan syariah, peluang pengembangan layanan berbasis teknologi, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dan implikasi terhadap pencapaian target SDG 8.

2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel analitik, atau matriks perbandingan untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar tema, khususnya antara tantangan, peluang, dan kontribusi BPRS terhadap SDG 8.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Peneliti menginterpretasikan temuan analisis dan melakukan validasi untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan kesimpulan yang diperoleh, dengan mengacu pada data yang telah dikumpulkan dan teori yang relevan.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan menggunakan metode triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda posisi dan perspektifnya pimpinan bank, pegawai, nasabah, dan pelaku UMKM untuk memverifikasi konsistensi temuan.
2. Triangulasi Metode: Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda terhadap fenomena yang sama dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga temuan dapat saling memperkuat dan mengkonfirmasi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Menurut DR Rahmat lsmail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HAJI MISKIN, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS HAJI MISKIN adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank lndonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang meniadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp.1 70.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sejak tanggal 26 februari 2013 modal disetor Bprs Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589"800.000,-(Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan

juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp.381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp.2.971.200.000,- dan pada Tahun 2018 dilakukan penambahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp.5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp.2.674.200.000 atau 51,95 % yang mana peruhan modal telah mendapat persesujuan dari OJK pada awal tahun 2019.

BPRS Haji Miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank lndonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank lndonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian lzin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal I Maret 2006 , saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas.

BPRS ini dinamai HAJI MISKIN adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama lslam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, HAJI MISKIN adalah Asisten Tuanku lmam Bonjol (Perang Pandri 1803 - 1836). Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran lslam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan HAJI MISKiN di kejar-kejar oleh Belanda

.HAJI MISKIN berhasil menyelamatkan dlri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam HAJI MlSKlN, di Kanagarian Pandai Sikek. Nama HAJI MlSKlN, juga telah diabadikan sebagai mana masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank lndonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank lndonesia No.32l36/KEP/DlR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

2. Moto BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

HIDUP BERKAH, TANPA RIBA DENGAN SYARIAH

3. Visi dan Misi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

a. Visi

Menjadikan BPRS Haji Miskin Sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat.

b. Misi

Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia di Masa Depan.

4. Tujuan dan Fungsi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

a. Tujuan

Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum/Bank Umum Syariah.

b. Fungsi

Fungsi BPR Syariah tidak hanya sekedar menyalurkan Pembiyaan kepada usaha Mikro kecil dan Menengah tetapi juga menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan Deposito serta produk-produk perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Bank lndonesia dan Fatwa DS.

5. Produk dan Pembiayaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

a. Tabungan

Produk penghimpunan Dana

1) Tabungan Mudharabah Umat
2) Tabungan Qurban
3) Tabungan Haji
4) Tabungan Pendidikan
5) Tabungan Wadiah

b. Deposito

c. Pembiayaan

Produk Penyaluran Dana (Pembiyaan)

1) Pembiyaan Murabahah (Jual Beli)
2) Pembiayaan ljarah (Sewa)
3) Pembiyaan ljarah Multi Jasa
4) Pembiyaan Mudharabah
5) Pembiyaan Musyarakah
6) Pembiyaan Talangan haji
7) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

6. Struktur Organisasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Struktur organisasi merupakan susunan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap bagian dalam suatu perusahaan agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Haji Miskin



Berdasarkan struktur organisasi PT BPRS Haji Miskin, pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis perusahaan, mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris, direksi, serta menyetujui laporan pertanggungjawaban perusahaan. Di bawah RUPS terdapat Komisaris Utama dan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja direksi agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aktivitas perusahaan. Direktur Utama membawahi beberapa bagian, antara lain Internal Audit, Bagian Operasional, Manajemen Risiko dan Fungsi

Kepatuhan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta Direktur Marketing dan Kepala Cabang. Bagian Internal Audit bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan guna memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Bagian Operasional bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional bank, yang didukung oleh unit kerja seperti Teller, Customer Service, Administrasi Operasional, Umum/AT, Asisten Umum, Security, Office Boy, Driver, serta unit pelayanan Kantor Kas.

Pada bidang kepatuhan, terdapat unit Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan, APU PPT, dan Pelaporan Keuangan Bank yang bertugas memastikan seluruh aktivitas bank telah memenuhi ketentuan regulator, mengelola risiko perusahaan, serta mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Unit ini juga didukung oleh Petugas APU PPT dalam menjalankan tugas operasionalnya. Di bidang pemasaran dipimpin oleh Direktur Marketing yang membawahi Kepala Divisi Bisnis, Kepala Bagian Marketing, Funding Officer, Account Officer, Administrasi Pembiayaan, Asisten Pembiayaan, dan Remedial. Unit ini memiliki tanggung jawab dalam menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, melakukan pemasaran produk, menjaga hubungan dengan nasabah, serta menangani pembiayaan bermasalah.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Informan utama adalah pimpinan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yang dipilih karena memiliki wewenang dan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan kelembagaan, strategi digital, dan tantangan operasional. Informan pendukung terdiri dari pimpinan dan pegawai BPRS, nasabah, dan pelaku UMKM yang menjadi penerima pembiayaan syariah.

Hasil penelitian ini menggambarkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam menghadapi perkembangan era digital, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan yang layak sebagaimana tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8. Data yang disajikan merupakan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan utama dan informan pendukung mengenai kebijakan dan strategi digital BPRS, pelaksanaan pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM, manfaat yang dirasakan oleh nasabah, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran BPRS terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

1. Tantangan yang Dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam Era Digital yang Menghambat Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penyediaan Pekerjaan yang Layak (SDGs 8)

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap industri perbankan, termasuk perbankan syariah.

Digitalisasi menghadirkan berbagai kemudahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti transaksi keuangan secara cepat, pemasaran produk melalui media digital, hingga kemudahan dalam pengajuan pembiayaan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek masih menghadapi sejumlah tantangan dalam proses transformasi digital. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan teknologi, tetapi juga menyangkut regulasi, kesiapan sumber daya manusia, persaingan dengan lembaga keuangan digital, serta karakteristik masyarakat yang menjadi nasabah BPRS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku Direktur Utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, diketahui bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi BPRS adalah belum tersedianya layanan digital secara menyeluruh seperti *mobile banking* maupun *internet banking*. Hal ini disebabkan karena BPRS harus memenuhi berbagai ketentuan regulasi sebelum dapat mengembangkan layanan digital secara mandiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Hendri sebagai berikut.

"Kalau layanan platform digital yang kamu tanyakan, di kita belum punya platform digital, tidak ada. Mungkin kalau platform digital seperti mobile banking itu memang belum ada di BPRS ini."[64]

Beliau juga menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui kerja sama dengan bank umum serta memenuhi ketentuan dari regulator.

[64] Hendri, (Direktur Utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

"Kalau regulasi ada juga, karena kita harus bekerja sama dengan bank umum dan harus ada izin dari OJK dan Bank Indonesia."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan layanan digital di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek bukan disebabkan oleh kurangnya keinginan untuk bertransformasi, melainkan karena adanya persyaratan regulasi yang harus dipenuhi. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS tetap harus menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar keamanan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Selain aspek regulasi, perkembangan *financial technology (fintech)* dan bank digital juga menjadi tantangan bagi BPRS dalam mempertahankan daya saing. Saat ini masyarakat cenderung menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses melalui telepon genggam. Kondisi tersebut menuntut BPRS untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal dari lembaga keuangan lainnya.

Meskipun demikian, BPRS tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hendri sebagai berikut.

"Kalau di BPRS tidak seperti itu. Ketika ada permohonan pembiayaan, kita tetap melakukan survei kepada nasabah, mengecek kondisi usaha, serta melihat kemampuan nasabah sebelum pembiayaan diberikan."[65]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses pembiayaan di BPRS memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan layanan pinjaman

[65] Hendri, (Direktur Utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

digital, prosedur tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini sekaligus menjadi ciri khas BPRS yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan keamanan sistem digital. Menurut Bapak Hendri, penerapan layanan digital tidak hanya membutuhkan aplikasi, tetapi juga memerlukan sistem keamanan yang kuat agar data serta dana nasabah tetap terlindungi. Beliau menyampaikan bahwa:

"Kalau ada layanan digital yang dimiliki, tentu harus dipastikan keamanan sistemnya. Karena yang kita kelola adalah dana masyarakat, jadi aspek keamanan menjadi hal yang sangat penting."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keamanan teknologi informasi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengembangan digitalisasi di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Risiko kejahatan siber yang semakin meningkat membuat pihak bank harus lebih berhati-hati sebelum menerapkan layanan digital secara penuh.

Hasil wawancara dengan Bapak Rinto selaku bagian Teknologi Informasi (TI) juga menunjukkan bahwa proses digitalisasi di BPRS masih menghadapi kendala dari sisi infrastruktur teknologi. Beliau menjelaskan bahwa:

"Itu kalau kita belum memasuki digital kali, karena kita masih belum menggunakan sistem digital pada saat ini."[66]

[66] Rinto, (Bagian Teknologi Informasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa kualitas jaringan internet sangat memengaruhi pelayanan kepada nasabah.

"Kalau kualitas internet pasti mempengaruhi. Kalau internet yang kita gunakan bagus, tentu pelayanan digital juga lebih cepat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi digital, tetapi juga harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai. Kualitas jaringan internet yang kurang stabil dapat menghambat kelancaran pelayanan kepada nasabah sehingga memengaruhi efektivitas operasional bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Osrizal Saputra selaku bagian Marketing**,** diketahui bahwa keterbatasan layanan digital juga menjadi tantangan dalam memperkenalkan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Saat ini layanan digital yang dimiliki BPRS masih terbatas pada penggunaan mesin EDC ketika petugas melakukan pelayanan di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa:

"Kalau layanan digital di kita itu belum ada. Paling adanya mesin EDC untuk setoran di lapangan. Jadi saat nasabah setor, langsung diproses dan diinput ke sistem."[67]

Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa BPRS belum dapat memperkenalkan layanan seperti *mobile banking* kepada masyarakat karena memang layanan tersebut belum tersedia.

"Kalau platform digital yang perlu kita kenalkan mungkin seperti mobile banking, tetapi di BPRS ini belum punya itu."

---

[67] Osrizal Saputra, (Bagian Marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan inovasi layanan digital menyebabkan proses sosialisasi kepada masyarakat juga belum dapat dilakukan secara maksimal. Meskipun demikian, penggunaan mesin EDC menunjukkan bahwa BPRS telah mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Dari sisi nasabah, tantangan digitalisasi juga dirasakan oleh Bapak Adib selaku nasabah pembiayaan UMKM. Menurut beliau, belum tersedianya layanan digital membuat sebagian transaksi masih harus dilakukan secara langsung di kantor BPRS. Beliau mengatakan:

"Kalau di BPRS itu belum ada layanan digital yang tersedia, mereka masih menggunakan mesin EDC untuk layanan digitalnya, belum ada layanan yang lain seperti mobile banking."[68]

Beliau juga berharap agar ke depan BPRS dapat mengembangkan layanan digital sehingga transaksi menjadi lebih mudah.

"Harapannya lebih ditingkatkan lagi pelayanan di kantor dan ke depannya dapat menyediakan layanan digital seperti mobile banking."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital semakin meningkat. Nasabah mengharapkan adanya inovasi pelayanan yang mampu memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor bank.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan utama dan informan pendukung, diperoleh informasi bahwa BPRS Haji

[68] Adib, (Nasabah Pembiayaan UMKM BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

Miskin Pandai Sikek menghadapi beberapa tantangan dalam menghadapi era digital. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan layanan digital, belum tersedianya layanan mobile banking, adanya persyaratan regulasi dalam pengembangan layanan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, pentingnya menjaga keamanan sistem informasi, serta meningkatnya persaingan dengan fintech dan bank digital. Berbagai tantangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan, pegawai, dan nasabah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Peluang yang Dapat Dimanfaatkan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam Era Digital untuk Mengoptimalkan Kontribusinya terhadap Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penyediaan Pekerjaan yang Layak Sesuai dengan Target SDGs 8

Perkembangan teknologi digital memberikan berbagai peluang bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan pemasaran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dan informan pendukung, diperoleh informasi bahwa meskipun BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum memiliki layanan digital seperti *mobile banking*, pemanfaatan media digital telah memberikan manfaat dalam kegiatan pemasaran, pelayanan kepada nasabah, serta pengembangan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Osrizal Saputra selaku bagian Marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, diketahui bahwa media digital telah dimanfaatkan sebagai sarana promosi produk-produk BPRS. Menurut beliau, penggunaan media sosial sangat membantu dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat sehingga informasi mengenai tabungan maupun pembiayaan dapat menjangkau calon nasabah dengan lebih luas. Beliau menjelaskan bahwa:

"Kalau di kita sangat membantu, karena dengan beberapa macam media sosial kita melakukan promosi produknya, biasanya di status WhatsApp, di platform media sosial kantor, kita juga melakukan promosi di situ dan efektivitasnya juga baik."[69]

Selain sebagai media promosi, penggunaan teknologi digital juga memberikan kemudahan dalam menjangkau calon nasabah. Beliau mengatakan:

"Betul, karena dengan adanya digital sangat membantu serta memudahkan dalam mencari nasabah."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial menjadi salah satu peluang bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam memperluas pemasaran produk kepada masyarakat. Dengan adanya media digital, informasi mengenai produk dan layanan BPRS dapat disampaikan lebih cepat dan menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu.

[69] Osrizal Saputra, (Bagian Marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

Lebih lanjut, Bapak Osrizal Saputra menjelaskan bahwa penggunaan media sosial turut mendukung peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya.Beliau menyampaikan bahwa:

"Ada, tiap tahun growth kita sekitar 10 persen dikasih target. Jadi sosial media salah satu penunjang untuk meningkatkan 10 persen itu. Karena pemegang saham minimal pertahun kita harus ada peningkatan, baik aset maupun pendapatan."

Beliau juga menjelaskan bahwa media sosial memberikan peluang yang besar dalam memperluas jangkauan promosi.

"Dengan adanya sosial media itu, jangkauannya tidak terbatas. Jangankan daerah kita di sini, promosinya sampai Sumatera Barat bahkan sampai ke Jakarta."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemanfaatan media sosial tidak hanya membantu kegiatan promosi, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan jumlah nasabah serta memperluas jangkauan pemasaran BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa produk pembiayaan dan tabungan masih menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat. Bapak Osrizal Saputra menjelaskan bahwa:

"Kita ada produk tabungan dan pembiayaan, itu diminati semua. Kalau di kita layanan pembiayaan atau tabungan itu sama."

Selanjutnya, mengenai kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, beliau menjelaskan bahwa kondisi perekonomian dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan sehingga memengaruhi perkembangan pembiayaan UMKM. Beliau mengatakan:

"Kalau untuk beberapa tahun terakhir agak kurang, tidak sesuai dengan yang direncanakan. Karena kondisi ekonomi sekarang lagi drop, jadi

banyak pelaku UMKM lebih memilih mengurangi beban biaya dan mengoptimalkan modal yang ada."

Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS tetap memberikan manfaat bagi perkembangan usaha nasabah dan berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Beliau menyampaikan bahwa:

"Insyaallah ada pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nasabah. Misalnya kita kasih pembiayaan kepada developer yang mau bikin perumahan, saat kita kasih pembiayaan otomatis dia membutuhkan karyawan untuk membangun rumah".

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa BPRS turut mendukung pelaku usaha melalui penyediaan modal usaha. Beliau mengatakan:

"Kalau dukungan dari bank tentu mempermudahkan, kemudian bank memberikan permodalan untuk mendukung UMKM, termasuk untuk pembelian stok barang dagang."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pembiayaan syariah yang diberikan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tidak hanya dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan membuka kesempatan kerja.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku Direktur Utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi BPRS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut beliau, perkembangan teknologi mendorong BPRS untuk terus melakukan penyesuaian terhadap

kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyediaan layanan digital pada masa yang akan datang. Beliau menyampaikan bahwa:

"Mungkin ke depan ada beberapa penambahan layanan digital untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi."[70]

Sementara itu, Bapak Adib selaku nasabah pembiayaan UMKM menjelaskan bahwa tambahan modal yang diperoleh dari BPRS memberikan dampak terhadap perkembangan usahanya. Beliau mengatakan:

"Ya yang namanya kita nambah modal pasti ada perkembangan dan peningkatan usaha."[71]

Beliau juga menjelaskan bahwa setelah memperoleh pembiayaan, kapasitas usahanya mengalami peningkatan karena stok barang menjadi lebih banyak. Beliau menyampaikan:

"Di kita sistemnya itu restock barang, jadi kalau ada tambahan modal pasti restock-nya lebih banyak dan transaksinya makin tinggi."

Selain itu, pembiayaan yang diterima juga berdampak pada penambahan tenaga kerja di usahanya. Beliau mengatakan:

"Iya, kebetulan kita menambah admin. Sebelumnya kita yang kontrol, sekarang sudah ada admin."

Nasabah juga menyampaikan harapannya agar BPRS terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menyediakan layanan digital yang lebih lengkap. Beliau mengatakan :

[70] Hendri, (Direktur Utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

[71] Adib, (Nasabah Pembiayaan UMKM BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara, 06 Juli 2026

"Harapannya lebih ditingkatkan lagi pelayanan di kantor dan ke depannya dapat menyediakan layanan digital seperti mobile banking."

Era digital memberikan berbagai peluang bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Peluang tersebut meliputi pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, perluasan jangkauan pemasaran, peningkatan jumlah nasabah, pengembangan layanan digital pada masa mendatang, serta optimalisasi pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan UMKM. Selain itu, pembiayaan yang diberikan BPRS juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usahanya, menambah tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

C. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menghadapi berbagai tantangan sekaligus memiliki peluang dalam menghadapi perkembangan era digital. Berbagai temuan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan informan utama dan informan pendukung yang terdiri atas pimpinan, pegawai, nasabah, dan pelaku UMKM. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual yang dihadapi BPRS dalam menjalankan fungsi intermediasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung perkembangan sektor usaha produktif di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan

teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga mampu menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam era digital serta kontribusinya terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8.

1. **Tantangan yang Dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam Era Digital yang Menghambat Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penyediaan Pekerjaan yang Layak (SDGs 8**

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menghadapi beberapa tantangan dalam menghadapi perkembangan era digital. Tantangan tersebut meliputi belum tersedianya layanan digital seperti *mobile banking* dan *internet banking*, keterbatasan regulasi dalam pengembangan layanan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan sistem informasi, serta meningkatnya persaingan dengan *financial technology* (fintech) dan bank digital. Berbagai tantangan tersebut memengaruhi kemampuan BPRS dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum memiliki layanan digital secara mandiri sehingga sebagian besar

pelayanan masih dilakukan secara langsung di kantor maupun melalui petugas lapangan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya persyaratan regulasi yang mengharuskan BPRS memperoleh izin dari regulator serta melakukan kerja sama dengan bank umum sebelum mengembangkan layanan digital secara penuh. Akibatnya, masyarakat belum dapat menikmati kemudahan transaksi seperti yang tersedia pada bank umum maupun bank syariah berskala besar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Keuis Hera Susanti (2024) yang menyatakan bahwa transformasi digital merupakan salah satu kebutuhan penting bagi perbankan syariah dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Digitalisasi memungkinkan layanan perbankan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Namun, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa implementasi transformasi digital memerlukan kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan dukungan regulasi agar dapat berjalan secara optimal.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Rizki Kurniawan dan Muhammad Iqbal Fasa (2024) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap industri perbankan syariah. Transformasi digital memberikan peluang dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi di sisi lain menuntut lembaga perbankan untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur teknologi dan

inovasi layanan menjadi faktor penting agar perbankan syariah tetap mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Selain keterbatasan layanan digital, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persaingan dengan perusahaan fintech menjadi salah satu tantangan yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Kehadiran berbagai layanan pinjaman digital yang menawarkan proses cepat dan mudah menyebabkan sebagian masyarakat lebih tertarik menggunakan layanan tersebut dibandingkan mengajukan pembiayaan melalui BPRS. Sementara itu, BPRS tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan melakukan survei usaha, analisis kemampuan pembayaran, dan penilaian jaminan sebelum pembiayaan disalurkan. Meskipun proses tersebut membutuhkan waktu lebih lama, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Temuan tersebut sesuai dengan penelitian Muhamad Subhan dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama perbankan syariah dalam mendukung pencapaian SDGs adalah meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan digital. Perbankan syariah dituntut untuk mampu berinovasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Sebelum mengembangkan layanan digital, pihak bank memandang bahwa keamanan data dan dana nasabah harus menjadi prioritas utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan aplikasi, tetapi juga harus didukung oleh sistem keamanan yang mampu melindungi transaksi dan data nasabah dari berbagai risiko kejahatan siber. Kesiapan teknologi informasi menjadi faktor penting agar digitalisasi dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko baru bagi lembaga maupun masyarakat.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan dalam proses transformasi digital. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas jaringan internet dan kesiapan sistem teknologi informasi masih memengaruhi efektivitas pelayanan kepada nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi yang memadai.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tetap mempertahankan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan personal yang dilakukan oleh pegawai bank dinilai masih sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah operasional BPRS yang sebagian besar berada di daerah pedesaan. Kedekatan antara pegawai dan

nasabah menjadi salah satu keunggulan yang mampu membangun kepercayaan serta memperkuat hubungan jangka panjang antara bank dengan masyarakat.

Sustainable Development Goals (SDGs) 8 memengaruhi optimalisasi kontribusi BPRS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak. SDGs 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sektor usaha produktif, khususnya UMKM. Keterbatasan layanan digital dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sehingga peluang pengembangan usaha produktif menjadi kurang optimal. Namun demikian, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tetap berupaya menjalankan fungsi intermediasinya melalui penyaluran pembiayaan syariah kepada masyarakat serta mempertahankan kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tidak hanya berasal dari perkembangan teknologi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh regulasi, kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, dan persaingan industri jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi agar BPRS dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 8

2. Peluang yang Dapat Dimanfaatkan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam Era Digital untuk Mengoptimalkan Kontribusinya terhadap Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penyediaan Pekerjaan yang Layak Sesuai dengan Target SDGs 8

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa era digital tidak hanya menghadirkan berbagai tantangan bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, tetapi juga membuka peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meskipun hingga saat ini BPRS belum memiliki layanan digital seperti *mobile banking* maupun *internet banking*, pemanfaatan teknologi digital telah mulai diterapkan melalui media sosial sebagai sarana promosi produk dan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, adanya rencana pengembangan layanan digital pada masa mendatang menunjukkan bahwa BPRS memiliki komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam memperkenalkan produk tabungan dan pembiayaan kepada masyarakat. Promosi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media digital lainnya dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran sehingga informasi mengenai produk BPRS dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi BPRS dalam menjangkau

calon nasabah baru sekaligus mempertahankan hubungan dengan nasabah yang telah ada.

Temuan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dengan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta mempercepat penyampaian informasi mengenai produk dan jasa. Digitalisasi memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai platform digital sehingga mampu meningkatkan daya saing di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Calvin Alfiansyah dan Fauzatul Laily Nisa (2024) yang menyatakan bahwa transformasi digital memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk mempertahankan eksistensi di tengah persaingan industri jasa keuangan yang semakin kompetitif.

Selain dimanfaatkan sebagai media promosi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kepada nasabah. Pihak BPRS telah memiliki rencana untuk mengembangkan layanan digital pada masa mendatang agar proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pengembangan layanan tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor BPRS. Dengan adanya inovasi layanan tersebut, kualitas pelayanan diharapkan semakin meningkat sehingga mampu memberikan kepuasan kepada nasabah.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Keuis Hera Susanti (2024) yang menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital menjadi salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian, peluang lainnya terlihat dari peran pembiayaan syariah yang diberikan BPRS kepada pelaku UMKM. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha sehingga membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas usahanya, menambah persediaan barang dagangan, serta mengembangkan kegiatan usaha. Bagi sebagian pelaku usaha, peningkatan modal juga berdampak pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas usaha yang semakin berkembang.

Temuan tersebut sesuai dengan teori perbankan syariah yang menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Melalui fungsi tersebut, perbankan syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha, serta mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Muhamad Subhan dkk. (2025) yang menyatakan bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kedelapan mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak. Penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha produktif menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.

Hasil penelitian SDGs 8 menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui penambahan modal usaha. Perkembangan usaha tersebut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi, bertambahnya kapasitas produksi, serta terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BPRS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah,

tetapi juga memiliki kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui dukungan terhadap sektor usaha produktif.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan promosi dan pelayanan juga memberikan peluang bagi BPRS untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Semakin luas akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah, maka semakin besar pula peluang berkembangnya UMKM yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kontribusi BPRS dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan target SDGs poin 8.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa era digital memberikan peluang yang cukup besar bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan pemasaran, mengembangkan layanan berbasis digital, serta memperkuat perannya dalam mendukung perkembangan UMKM. Apabila peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan infrastruktur teknologi, inovasi layanan, dan penguatan sumber daya manusia, maka BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memiliki potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 8.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa era digital memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Di satu sisi, BPRS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan layanan digital, regulasi, infrastruktur teknologi, keamanan sistem informasi, serta persaingan dengan lembaga keuangan digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat peran BPRS dalam mendukung perkembangan usaha masyarakat melalui pembiayaan syariah.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, menciptakan kesempatan kerja yang produktif, serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Melalui penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya pengembangan layanan berbasis digital, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memiliki peran dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan peluang digital yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, dan inovasi layanan diharapkan mampu memperkuat kontribusi BPRS terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target SDGs 8.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek di era digital meliputi belum tersedianya layanan digital seperti *mobile banking* dan *internet banking*, keterbatasan infrastruktur teknologi, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, tingginya persaingan dengan *fintech* dan bank digital, serta pentingnya menjaga keamanan sistem informasi dan data nasabah. Di samping itu, BPRS tetap harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam setiap proses pembiayaan sehingga proses pelayanan tidak dapat dilakukan secepat lembaga keuangan digital lainnya. Berbagai tantangan tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi layanan keuangan syariah dan pencapaian tujuan SDGs 8, khususnya dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

Peluang yang dimiliki BPRS Haji Miskin Pandai Sikek di era digital cukup besar untuk mendukung pencapaian SDGs 8. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, rencana pengembangan layanan digital, serta penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM menjadi peluang strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Pembiayaan yang diberikan juga berkontribusi terhadap pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta membuka kesempatan kerja baru. Oleh karena itu, apabila peluang digital tersebut

dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan inovasi layanan, maka BPRS Haji Miskin Pandai Sikek akan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 8.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, diharapkan dapat mempercepat transformasi digital melalui pengembangan layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, maupun layanan digital lainnya yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang teknologi informasi, penguatan sistem keamanan data, serta peningkatan infrastruktur teknologi agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan digital.
2. Bagi masyarakat dan pelaku UMKM, diharapkan dapat memanfaatkan layanan pembiayaan syariah yang disediakan oleh BPRS secara produktif untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan literasi keuangan syariah dan literasi digital agar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan beberapa BPRS atau bank syariah di daerah lain, menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods*, serta mengkaji implementasi digitalisasi terhadap kinerja keuangan, kepuasan nasabah, maupun pencapaian indikator SDGs lainnya sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

‘4 1,3,4’, 4 (2023), 229–41

Aflah, Fadli Ramadhanul, and Sri Murhayati, ‘Penelitian Fenomenologis’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2025), 13099–109

Aisyah, Rizki, and Nessa Nurtohmah, ‘Analisis Perubahan Pendapatan Per Kapita Di Indonesia: Tren Dan Faktor-Faktor Penyebab’, *Journal of Cyber and Community Service*, 1 (2025), 15–20 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Azana, Ihdina Isra, ‘Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Era Digital’, 2025, 1–30

Basalma, Ebrahim Omar, ‘The SDG-Islamic Banking Nexus: Insights from the OIC Top Economies’, *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13 (2024), 347–68 <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.21917>

Berkelanjutan, Pertumbuhan, Rizki Kurniawan, and Muhammad Iqbal Fasa, ‘Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam’, *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik* , 2 (2024)

Calvin Alfiansyah, and Fauzatul Laily Nisa, ‘Analisis Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan’, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2 (2024), 199–210 <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814>

Dan, Keuangan, Ekonomi Hijau, and Arsyaf Tampubolon, *Ekonomi Digital Menuju Inklusi Ekonomi Digital Menuju Inklusi*, 2019

Department of Economic and Social Affairs, ‘The Sustainable Development Goals Report’, *United Nations*, 2023, 26–27 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/#>

Egger, Philippe, ‘Towards a Policy Framework for Decent Work’, *International*

Labour Review, 141 (2002), 161–74 <https://doi.org/10.1111/j.1564-913x.2002.tb00234.x>

Fadhilah., 'Digitalisasi Sistem Pembayaran Dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (2025), 13–18

Gisatriadi, Norman, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital', *Jurnal Media Ilmu*, 3 (2024), 216–31 <https://doi.org/10.31869/jmi.v3i2.6092>

Guiraudon, Virginie, 'European Court of Justice', *Immigration and Asylum [3 Volumes]: From 1900 to the Present [3 Volumes]*, 1 (2005), 217–19 <https://doi.org/10.54648/ecta2007029>

Hakim, Lukman, *Manajeme Perbankan Syariah*, 2016 <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>

Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2014

Hasibuan, Fitriani, Adanan Murroh Nasution, Sarmiana Batubara, and Nofinawati Nofinawati, 'Analisis Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5 (2024), 54–67 <https://doi.org/10.24952/jisfim.v5i1.12287>

Hera Susanti, Keuis, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan', *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2 (2024), 13–19 <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>

Horn, Robert V., 'Statistical Indicators', *Statistical Indicators*, 142 (1993) <https://doi.org/10.1017/cbo9780511518164>

ILO, *Decent Work and the Sustainable Development Goals : A Guidebook on SDG Labour Market Indicators*, *©International Labour Organization*, 2018 <https://www.ilo.org/media/414431/download>

Implementasi, Kebijakan D A N, 'INDONESIA DALAM SISTEM INFORMASI', 11 (2026), 543–59

Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin, ‘Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara’, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2 (2024), 40–47 <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>

Jonni M., Adler Haymans M. (2019). Ekonomi keuangan dan kebijakan moneter, Penerbit Salemba empat, Jakarta

Journal, Nomico, ‘Sustainable Finance As A Moral Objective: An Islamic Economic Philosophy Perspective On The Optimization Of Sharia Fintechsuhardi Arif Rahman Hakim 1 , Wahyu Amru Rofiqhoh 2 , Nur Siamah 3’, 2 (2026), 1–10

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ‘Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Menuju 2030’, *Kementerian PPN/Bappenas*, 2021, 35 <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf>

Kementerian PPN, ‘Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)’, *Kementerian PPN*, 2020

Khairunnisa, Nisa, Nur Komariah, Kamal Akbar, Mucriadin Mucriadin, and Suriati Suriati, ‘Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital’, *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3 (2024), 113–22 <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.553>

Konsep, Analisis, and Pendekatan Pengukuran, ‘Interdisciplinary Explorations in Research FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN’, 2 (2024), 1375–84

Mandala, Manurung., Rahartja Prathama. (2014), Uang, Perbankan, dan ekonomi Moneter. Penerbit Fakultas Ekononomi Universitas Indonesia.

nderst, Roman, Mueller, Holger., (2008). “Bank Capital strukture and Credit

Desisions", journal Of Financial Intermediation, No 17 pp. 295-314

Nofinawati, Nofinawati, 'Akad Dan Produk Perbankan Syariah', *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8 (2014), 219 <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>

Nugraha, Muhammad Agung Nugraha, Norvadewi Norvadewi, and Yovanda Noni, 'Analisis Implementasi Digital Banking Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Samarinda', *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 1 (2024), 314–21 <https://doi.org/10.59407/jismdb.v1i3.628>

O'Connor, David E., *Sustainable Economic Development, Economics: The Definitive Encyclopedia from Theory to Practice*, 2017, IV–IV <https://doi.org/10.5040/9798400638503.ch-013>

OJK, 'Booklet Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan', *Survey Report*, 2022, pp. 1–26 <www.ojk.go.id>

Ozili, Peterson K., 'Financial Inclusion Research around the World: A Review', *Forum for Social Economics*, 50 (2021), 457–79 <https://doi.org/10.1080/07360932.2020.1715238>

Pradhan, Prajal, Luís Costa, Diego Rybski, Wolfgang Lucht, and Jürgen P. Kropp, 'A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions', *Earth's Future*, 5 (2017), 1169–79 <https://doi.org/10.1002/2017EF000632>

Privatum, Lex, 'Lex Privatum , Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014', 2014

Purba, D, S, P, D Permatasari, N Tanjung, P Rahayu, R FItriani, and S Wulandari, 'Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* , 10 (2021), 126–39

Regina, Tannia, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempenggaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi*

Dan Bisnis, 11 (2022), 36–45 <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.201>

Sari, Adelia, Izza Aulianisa, and Ilham Ilham, 'Dasar Hukum Dan Prinsip Perbankan Syariah Di Indonesia', *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07 (2025), 77–87

Shiddiqy, Muhammad Ash, 'Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital', *Jasie*, 2 (2023), 677–83 <https://doi.org/10.31942/jse.v2i1.8410>

Somavía, Juan, 'Adress of Secretary-General of the International Labour Conference', *International Labour Conference*, 1999

Statistik, Badan Pusat, 'KEADAAN', 2024

Subhan, Muhamad, Sintia Delvianti, Boby Indrawan, and Aditya Nasrullah, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mendukung SDGs Di Indonesia', *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5 (2025), 122–39

Syariah, Perbankan, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Islam, and Negeri Alauddin Makassar, 'Prinsip - Prinsip Hukum Perbankan Syariah', 2025

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith, *Economic Development (13th Ed.)*, *Pearson*, 2020 <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>

UN DESA, 'The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023 New York, USA: UN DESA. © UN DESA', *Un*, 2023 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>

United Nations, 'The Millennium Development Goals Report', *United Nations*, 2015, 72 <https://doi.org/978-92-1-101320-7>

Wardiansyah, M, Yulmardi Yulmardi, and Zainul Bahri, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera)', *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 5 (2017),

13–18 <https://doi.org/10.22437/jels.v5i1.3924>

Wulan, Ariby, Deswita Naila, and Hasibuan Reni Ria Armayani, 'Economic Insight: Journal of Economic and Management', *Economic Insight: Journal of Economic and Management*, 1 (2025), 54–61 <https://journal.aspublisher.co.id/index.>

Zulfahmi Syahputra Nasution, Irsad Lubis, 'The Role of Islamic Financial Institutions in Encouraging Sustainable Economic Growth in Indonesia', *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1 (2025), 75–86 <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.249>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara kualitatif, yang memfokuskan pertanyaan mendalam atau terbuka, dan kompleksitas. Sehingga dapat diketahui sudut pandang dan pendapat informan dalam menanggapi berbagai pertanyaan secara lebih luas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka penelitian tugas akhir (Skripsi) pada program studi perbankan syariah (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, saya:

Nama	: Yuni Aqilah
Nim	: 3322008
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Sandra Dewi, SE., MM
Narasumber	: Pelaku UMKM dan Pihak Bank BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **" Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Era Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs. 8) (Studi Kasus: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)"**

Sehubung dengan hal tersebut, saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan/wawancara dari penelitian ini.

A. IDENTITAS INFORMAN

1) Pemimpin/Direksi BPRS Haji Miskin

1. Nama : Hendri
2. Usia : 64 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Jorong Serolangga Nagari Pasia, Ampek Nagari
5. Pendidikan : Sarjana (S1)

2) Bagian Teknologi Informasi (TI)

1. Nama : Rinto
2. Usia : 29 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Nagari Padang Laweh, Kab. Agam
5. Pendidikan : Diploma (D3)

3) Bagian Marketing/Pembiayaan

1. Nama: Osrizal Syahputra
2. Usia: 38 tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-Laki
4. Alamat: Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang
5. Pendidikan: Diploma (D3)

4) Nasabah Pembiayaan UMKM

1. Nama: Adib
2. Usia: 26 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Tangah Jua
5. Pendidikan : Diploma (D3)

B. PERTANYAAN

1) Pemimpin/Direksi BPRS Haji Miskin

Aspek Digitalisasi Perbankan

a. Bagaimana Bapak/Ibu melihat perkembangan teknologi digital yang terjadi di dunia perbankan saat ini?
b. Layanan digital apa saja yang sudah diterapkan di BPRS Haji Miskin?
c. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat digitalisasi bagi operasional bank dan pelayanan kepada nasabah?
d. Bagaimana respon nasabah terhadap layanan digital yang disediakan oleh bank?

Aspek Tantangan Era Digital

a. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BPRS Haji Miskin dalam menjalankan layanan digital?
b. Apakah masih ada nasabah yang kesulitan menggunakan layanan digital? Jika ada, bagaimana cara bank mengatasinya?
c. Bagaimana BPRS Haji Miskin menghadapi persaingan dengan bank lain maupun fintech yang semakin berkembang?
d. Apakah terdapat kendala terkait regulasi atau kebijakan dalam pengembangan layanan digital?

Aspek Peluang Era Digital

a. Menurut Bapak/Ibu, peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan BPRS melalui perkembangan teknologi digital?
b. Apakah digitalisasi membantu bank menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan?

Aspek SDGs 8

a. Bagaimana peran BPRS Haji Miskin dalam membantu pertumbuhan usaha masyarakat, khususnya UMKM?
b. Apakah pembiayaan yang diberikan bank dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru?
c. Sejauh mana program-program bank mendukung tujuan SDGs 8 tentang pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak?

Pengalaman Informan

a. Selama memimpin di BPRS Haji Miskin, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menghadapi perubahan menuju era digital?
b. Menurut Bapak/Ibu, apa harapan untuk perkembangan BPRS Haji Miskin di era digital ke depan?
c. Apa saran yang dapat diberikan agar layanan digital BPRS Haji Miskin semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat?

2) Bagian Teknologi Informasi (TI)

Aspek Digitalisasi

a. Teknologi atau sistem digital apa saja yang saat ini digunakan di BPRS Haji Miskin?
b. Layanan digital apa yang paling sering digunakan oleh nasabah?
c. Bagaimana proses pengembangan atau pembaruan sistem digital di BPRS Haji Miskin?

Aspek Tantangan Digital

a. Kendala teknis apa yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan layanan digital?
b. Apakah kualitas jaringan internet mempengaruhi pelayanan digital kepada nasabah?
c. Bagaimana bank menjaga keamanan data dan transaksi nasabah?
d. Apakah pernah terjadi gangguan sistem atau ancaman keamanan siber? Bagaimana penanganannya?

Aspek Peluang Digital

a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana teknologi digital membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja bank?
b. Apakah ada rencana pengembangan teknologi baru untuk mendukung layanan BPRS Haji Miskin di masa depan?

Pengalaman Informan

a. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama terlibat dalam proses digitalisasi di BPRS Haji Miskin?
b. Menurut Bapak/Ibu, apa harapan untuk perkembangan BPRS Haji Miskin di era digital ke depan?
c. Apa saran yang dapat diberikan agar layanan digital BPRS Haji Miskin semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat?

3) Bagian Marketing/Pembiayaan

Aspek Digitalisasi

a. Bagaimana teknologi digital membantu kegiatan pemasaran produk BPRS Haji Miskin?
b. Apakah penggunaan media digital memudahkan dalam menjangkau calon nasabah?

Aspek Peluang Digital

a. Apakah setelah adanya layanan digital jumlah nasabah mengalami peningkatan?
b. Bagaimana digitalisasi membantu menjangkau pelaku UMKM di berbagai daerah?
c. Produk atau layanan apa yang paling diminati nasabah saat ini?

Aspek Pertumbuhan Ekonomi

a. Bagaimana perkembangan pembiayaan UMKM dalam beberapa tahun terakhir?
b. Apakah pembiayaan yang diberikan bank berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah?

Aspek SDGs 8

a. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah pembiayaan yang diberikan dapat membantu membuka lapangan kerja baru?
b. Bagaimana bank mendukung usaha-usaha yang berpotensi menciptakan pekerjaan yang layak?

Aspek Tantangan

a. Kendala apa yang sering ditemui saat mengenalkan layanan digital kepada nasabah?
b. Bagaimana cara bank meningkatkan pemahaman nasabah mengenai layanan digital?

Pengalaman Informan

a. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam memasarkan produk perbankan syariah di era digital saat ini?

b. Menurut Bapak/Ibu, apa harapan untuk perkembangan BPRS Haji Miskin di era digital ke depan?
c. Apa saran yang dapat diberikan agar layanan digital BPRS Haji Miskin semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat?

4) Nasabah Pembiayaan UMKM

Penggunaan Layanan Digital

a. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah di BPRS Haji Miskin?
b. Layanan digital apa saja yang pernah Bapak/Ibu gunakan?
c. Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan digital di BPRS Haji Miskin mudah digunakan?

Manfaat Digitalisasi

a. Apakah layanan digital membantu mempermudah transaksi atau kegiatan usaha sehari-hari?
b. Apa manfaat yang paling dirasakan setelah menggunakan layanan digital di BPRS Haji Miskin?

Tantangan Digital

a. Apakah pernah mengalami kesulitan saat menggunakan layanan digital? Bisa diceritakan?
b. Apakah jaringan internet atau faktor lainnya pernah menjadi kendala?

Pertumbuhan Ekonomi

a. Setelah memperoleh pembiayaan dari BPRS Haji Miskin, apakah usaha Bapak/Ibu mengalami perkembangan?
b. Bagaimana perubahan pendapatan usaha setelah mendapatkan pembiayaan?

SDGs 8 (Pekerjaan Layak)

a. Apakah usaha Bapak/Ibu saat ini telah mempekerjakan karyawan?
b. Setelah memperoleh pembiayaan, apakah jumlah tenaga kerja bertambah?
c. Apakah pembiayaan tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan usaha dan pekerja?

Perbankan Syariah

a. Mengapa Bapak/Ibu memilih menggunakan layanan BPRS Haji Miskin dibandingkan lembaga keuangan lainnya?
b. Menurut Bapak/Ibu, apa kelebihan perbankan syariah dibandingkan bank konvensional?

Pengalaman Informan

a. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu menggunakan layanan dan pembiayaan dari BPRS Haji Miskin selama ini?
b. Menurut Bapak/Ibu, apa harapan untuk perkembangan BPRS Haji Miskin di era digital ke depan?
c. Apa saran yang dapat diberikan agar layanan digital BPRS Haji Miskin semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 324.6/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Yuni Aqilah** NIM. **3322008** tanggal 11 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Era Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs. 8)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Dr. Sandra Dewi, SE, MM**
NIP	:	197307172014112002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 September 2025
Dekan,

AID[illegible]FIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22675
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1285/Un.26.3/PP.07/06/2026 25 Juni 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Haji Miskin
Jl. Bukittinggi-Padang Panjang KM. 10 Simpang Koto Tinggi
Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranyaN memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Yuni Aqilah**
NIM	: 3322008
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***" Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Era Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs. 8) (Studi Kasus: BPRS Haji Miskin)"***
Lokasi Penelitian	: PT. BPRS Haji Miskin Jl. Bukittinggi-Padang Panjang KM. 10 Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar
Waktu	: 25 Juni s.d. 25 Juli 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN

Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang Km.10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

Nomor : 262/BPRS-HM/VII/2026

Pandai Sikek, 10 Juli 2026

Kepada Yth,
Pelaksana Jurusan Perbankan Syariah
UIN Sjech. M Djamil Djambek Bukittinggi
Di
Tempat

Perihal : **Izin Penelitian**

Assalamu'laikum Wr, Wb

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat Nya kepada kita semua serta diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin

Menunjuk Surat Bapak/Ibu Nomor B-1285/Un.26.3/PP.07/06/2026 tentang Permohonan Izin Melakukan Penelitian maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada :

Nama	**: Yuni Aqilah**
NIM	**: 3322008**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**
Judul	**: Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Era Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Yang Layak (SDGs.8)(Studi Kasus: BPRS Haji Miskin)**

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alikum Wr Wb

PT BPRS HAJI MISKIN

BPR SYARIAH HAJI MISKIN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HAJI MISKIN
PANDAI SIKEK X KOTO TANAH DATAR-SUMBAR

HADI NURHENDRA
Direktur

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN

Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang Km.10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 263/BPRS-HM/VII-2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT BPRS Haji Miskin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Yuni Aqilah
Nim	: 3322008
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul ("Analisa Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Era Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Yang Layak (SDGs.8)(Studi Kasus: BPRS Haji Miskin)")

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pandai Sikek, 10 Juli 2026
PT BPRS HAJI MISKIN

HADI NURHENDRA
Direktur

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pimpinan BPRS Haji Miskin



Wawancara dengan Bagian Teknologi Informasi / IT BPRS Haji Miskin



Wawancara dengan Bagian Marketing/Pembiayaan BPRS Haji Miskin



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan UMKM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yuni Aqilah (Yuni), lahir di Medan pada tanggal 07 Juni 2004, anak kedua dari dua bersaudara, pasangan dari bapak Sugiarto dan Ibu Leli Ismei Rahayu. Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar tepat pada umur 6 tahun di MIS Nurul Falaq pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Iman dan selesai pada tahun 2019, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAS Proyek Univa Medan dan selesai pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri dengan jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan alhamdulillah selesai pada tahun 2026.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, doa dan dukungan dari orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi. Niat, usaha, doa dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (SDGs 8) (Studi Kasus : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)”.